

## **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

**Azizah Rahman, Marwah Yusuf** ✉

Program Pascasarjana, STIEM Bongaya

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang melibatkan 62 staf keuangan yang bekerja pada 31 Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan metode kuesioner. Selanjutnya, dilakukan uji instrument penelitian (terdiri atas uji validitas dan uji realibilitas), uji asumsi klasik (terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas), analisis data (analisis statistik deskriptif dan uji statistik inferensial), serta uji hipotesis (uji simultan, uji parsial, dan uji determinasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Kota Makassar

*Kata Kunci: Kinerja; Kejelasan Sasaran Anggaran; Sistem Pelaporan*

### **Abstract**

This study aims to examine and examine the effect of the clarity of budget targets and reporting systems on the performance accountability of government agencies in Makassar City Regional Apparatus Organizations. This research is a descriptive quantitative study involving 62 financial staff who work in 31 Makassar City Regional Apparatus Organizations. Sample selection using a purposive sampling method. Data were collected using a questionnaire method. Furthermore, the research instrument test (consisting of validity test and reliability test), classical assumption test (consisting of normality test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test), data analysis (descriptive statistical analysis and inferential statistical test), and hypothesis testing (test simultaneous test, partial test, and determination test). The results showed that the Clarity of Budget Targets and Reporting Systems simultaneously had a positive and significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies in the Makassar City Regional Apparatus.

**Keywords:** Performance; Clarity of Budget Targets; Reporting System

---

Copyright (c) 2021 Nurazizah Rahman, Marwah Yusuf

✉ Corresponding author :

Email Address : marwah\_yusuf@gmail.com

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik (Rahim et al., 2018). Akuntabilitas juga merupakan salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi dalam mewujudkan *good governance*. Melalui laporan akuntabilitas, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan, dan apakah kepercayaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya yang ada telah dimanfaatkan dengan baik, dengan kata lain apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif (Muslim et al., 2019).

Setiap instansi pemerintahan atau pihak yang diberi amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan demikian, sejauh mana tingkat pengungkapan kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas pemerintah menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan dengan mengungkapkan kejelasan sasaran anggaran yang direalisasikan dan adanya sistem pelaporan yang transparan (Rahim et al., 2020). Akan tetapi kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena semakin banyaknya instansi pemerintah kelihatan tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan signifikan, keadaan tersebut menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan publik yang lebih baik.

Bukti nyata terkait permasalahan akuntabilitas kinerja, yaitu masih rendahnya akuntabilitas kinerja baik ditingkat nasional maupun daerah. Sebuah artikel berjudul "21 OPD Pemkot Makassar Masuk Kategori Realisasi Anggaran Rendah" dipublikasikan oleh Tribun Timur.com pada tanggal 17 Desember 2019 jam 15:25 Wita. Pemerintah Kota Makassar melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk Anggaran Belanja Langsung triwulan IV di balai kota Makassar. Dari laporan Bappeda, sebanyak 21 organisasi perangkat daerah mempunyai rapor merah untuk realisasi anggaran rendah belanja langsung. Padahal Bappeda berharap realisasi fisik diakhir 2019 diatas 90% sebelum Januari 2020. Untuk mengatasi permasalahan seperti yang diketahui maka Pemerintah Makassar khususnya aparaturnya pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya *good governance* atau yang biasa disebut dengan pemerintahan yang baik sehingga mampu menyediakan *public good* dan *public service* untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah harus membenahi diri untuk melakukan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.

Cahyani et al., (2015) mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah, salah satunya yaitu kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana sasaran anggaran jelas dan spesifik, sehingga orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai sasaran anggaran dapat memahami anggaran. Semakin jelas sasaran anggaran, semakin mudah aspek-aspek tertentu menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tujuan yang ditetapkan dalam organisasi (Indrayani et al., 2017). Oleh karena itu, kejelasan tujuan anggaran harus spesifik, terukur, terstandarisasi, terikat waktu,

memiliki tujuan utama, dan berorientasi pada hasil akhir. Semakin tepat sasaran anggaran, semakin baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Halim & Kusufi, 2019).

Hal lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Sistem Pelaporan. Menurut Hidayatullah, (2020), Sistem Pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Selain itu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Sehingga Sistem pelaporan yang baik akan membandingkan kinerja keuangan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi serta evaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian, sistem pelaporan yang berjalan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Para peneliti terdahulu yang telah mengkaji terkait topik penelitian ini, diantaranya, Cahyani et al., (2015) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian, penelitian Mulyadi et al., (2018) menunjukkan hasil yang sama yaitu kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Aceh. Berbeda dengan penelitian Pratama et al., (2019) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak Berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Adanya perbedaan hasil penelitian para peneliti terdahulu, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mulyadi et al., (2018) dengan judul Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Pemerinta Aceh). Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Mulyadi et al., (2018) adalah lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun persamaannya adalah penggunaan variabel sasaran anggaran dan sistem pelaporan, dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam di balik pengaruh sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah serta adanya fenomena mengenai kinerja OPD instansi pemerintah yang masih buruk. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Teori keagenan (agency theory) sebagai acuan untuk memaknai akuntabilitas publik sebagai kewajiban dari pemerintah selaku pihak pemegang amanah (agent), dalam memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat selaku pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Rosalin, 2011). Yusrianti et al., (2013) mengemukakan hubungan antara riset teori agensi adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) harus menetapkan strategi khusus agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada publik sebagai prinsipal. Masalah keagenan dalam praktek pelaporan keuangan pada organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh

teori keagenan. Agency theory memfokuskan perhatian pada agency problem yang terjadi ketika terdapat hubungan keagenan antara principal dengan agent. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan dan masyarakat atau publik yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai tercapainya akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (LAN, 2004). Akuntabilitas tersebut meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. BPKP, (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Lebih lanjut dijelaskan melalui penelitian yang dilakukan oleh Cahyani et al., (2015), bahwa akuntabilitas merupakan instrumen kegiatan kontrol yang terkait dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya dengan transparan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut didukung oleh Magdalena et al., (2016) bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi, maka keuangan daerah tersebut bisa jadi sebuah manipulasi atau kebohongan dan bahkan hanya karangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya. Chintya, (2015) menambahkan bahwa sebagai organisasi publik, pemerintah daerah harus memiliki kinerja yang berorientasi pada masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk selalu tanggap terhadap kebutuhan lingkungan, berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta pembagian kerja yang baik dalam pemerintahan. Mendukung pernyataan tersebut, Setiawan, (2017) menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu pemerintahan tergantung pada kemampuan menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan adil bagi masyarakat selaku salah satu pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan demikian, sejauh mana tingkat pengungkapan kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas pemerintah menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan dengan memberikan sasaran anggaran yang jelas dan sistem pelaporan yang baik.

Cahyani et al., (2015) melalui penelitiannya membuktikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Serta membuktikan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggarannya,

Semakin jelas tujuan dari anggaran maka akan mempermudah bagi pihak-pihak tertentu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan tujuan yang telah ditetapkan disebuah organisasi (Indrayani et al., 2017). Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran harus dinyatakan secara spesifik, terukur, standar, memiliki batas waktu, sasaran prioritas dan berorientasi pada hasil akhir. Semakin tepat dalam membidik sasaran anggaran, maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja suatu instansi (Abdul & Iqbal, 2012). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta adanya kejelasan sasaran anggaran kinerja suatu unit kerja organisasi yang dinilai baik secara finansial. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran.

Penelitian Mulyadi et al., (2018) menunjukkan hasil yang sama yaitu Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Aceh. Sebaliknya, Pratama et al., (2019) menemukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

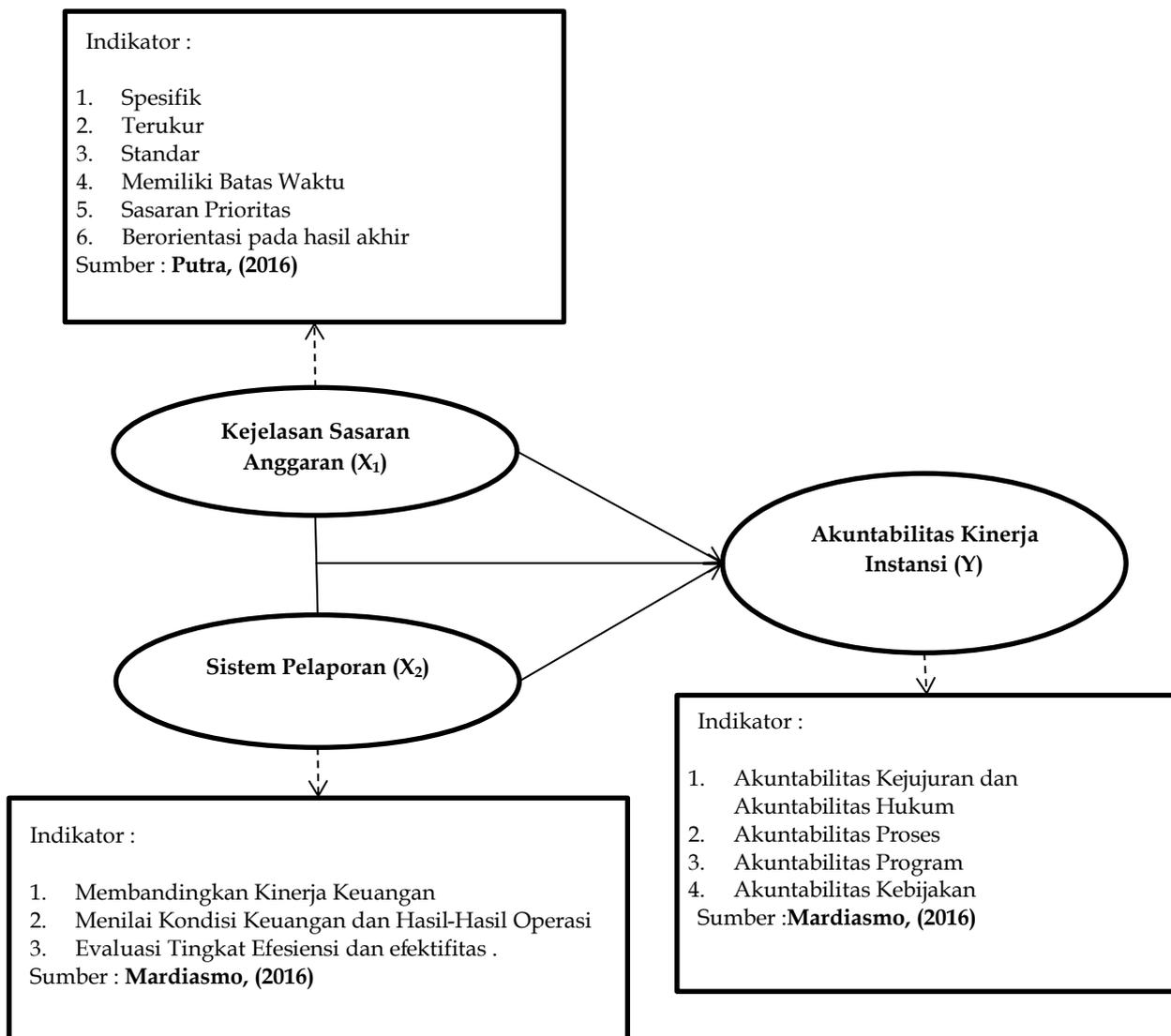
H2 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar

Selain kejelasan sasaran anggaran, Cahyani et al., (2015) menunjukkan masih ada variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, salah satunya yaitu sistem pelaporan. Sistem pelaporan adalah proses penyusunan dan penyampaian hasil pelaksanaan tugas yang meliputi capaian kinerja program dan kegiatan, serta realisasi keuangan dan fisik. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode tertentu. Selain itu, laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang baik akan membandingkan kinerja keuangan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, dan mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian, sistem pelaporan yang berjalan baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi et al., (2018) bahwa Sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh, maka dirumuskan hipotesis berikut:

H3 : Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar

Berkaitan dengan uraian tersebut, gambaran menyeluruh terkait Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam skema berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODOLOGI

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah kota Makassar yang berjumlah 51 Dinas dan Badan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dimana sampel merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap kepala bagian keuangan OPD yang berdasarkan tupoksi dan struktur organisasi (sebanyak 31 OPD yang dipilih dan 2 staf keuangan yang mewakili, sehingga responden berjumlah 62 orang). Setelah data terkumpul, dilakukan uji instrument penelitian (terdiri atas uji validitas dan uji realibilitas) dan uji asumsi klasik (terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan uji statistik

inferensial. Terakhir, dilakukan uji hipotesis yang terdiri atas uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), dan uji determinasi (R<sup>2</sup>).

**Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1.	Kejelasan Sasaran Anggaran (X <sub>1</sub> )	Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut	1. Spesifik 2. Terukur 3. Standar 4. Meiliki Batas Waktu 5. Sasaran Prioritas 6. Berorientasi pada hasil akhir Sumber : Putra (2013)	Ordinal
2.	Sistem Pelaporan (X <sub>2</sub> )	Sitem Pelaporan merupakan penyampaian hasil kinerja & realisasi keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan capaian tugas pada periode tertentu.	7. Membandingkan Kinerja Keuangan 8. Menilai Kondisi Keuangan dan Hasil-Hasil Operasi 9. Evaluasi Tingkat Efisiensi dan Efektifitas. Sumber : Mardiasmo (2016)	Ordinal
3.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.	10. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 11. Akuntabilitas Proses 12. Akuntabilitas Program 13. Akuntabilitas Kebijakan. Sumber : Mardiasmo (2016:19)	Ordinal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tabel 2, diketahui bahwa semua butir instrument variabel bebas (Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan) dan variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dinyatakan valid karena r hitung > 0,30. Berdasarkan nilai uji validitas seluruh variabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian sudah representatif. Dalam artian mampu mengungkapkan data dengan benar. Dari tabel 3, diketahui bahwa semua butir instrument variabel bebas (Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan) dan

variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dinyatakan Reliabel. Berdasarkan nilai uji Reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang peneliti gunakan dalam penelitian sudah terbilang handal. Dalam artian mampu mengungkapkan data dan variabel yang diteliti secara tepat.

**Tabel 2. Hasil Uji Validasi**

Variabel/Indikator	$R_{hitung}$	Keterangan	
Kejelasan Sasaran Anggaran	X1.1	0.644	Valid
	X1.2	0.575	Valid
	X1.3	0.748	Valid
	X1.4	0.640	Valid
	X1.5	0.732	Valid
	X1.6	0.683	Valid
	X1.7	0.673	Valid
	X1.8	0.689	Valid
	X1.9	0.697	Valid
	X1.10	0.593	Valid
	X1.11	0.544	Valid
	X1.12	0.510	Valid
Sistem Pelaporan	X2.1	0.775	Valid
	X2.2	0.813	Valid
	X2.3	0.705	Valid
	X2.4	0.645	Valid
	X2.5	0.792	Valid
	X2.6	0.720	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Y1.1	0.787	Valid
	Y1.2	0.701	Valid
	Y1.3	0.877	Valid
	Y1.4	0.740	Valid
	Y1.5	0.737	Valid
	Y1.6	0.739	Valid
	Y1.7	0.486	Valid
	Y1.8	0.603	Valid

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.870	Reliabel
Sistem Pelaporan	0.835	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.858	Reliabel

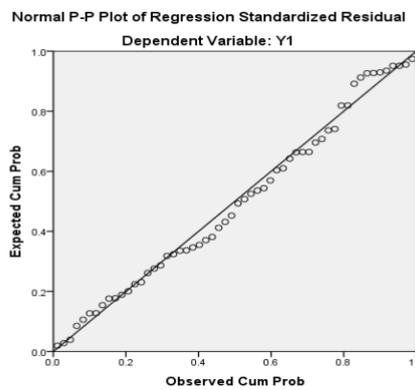
**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		56
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	4.4501786
	Std. Deviation	.22819169
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.070
	Negative	-.094

Test Statistic	.094
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4, diketahui nilai signifikansi sebesar 0.200 yang mengartikan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Dalam pengujian Normalitas diketahui bahwa untuk melihat pola/ Grafik dapat dilakukan pengujian Normal P-P plot yang dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. Hasil Pengujian Normal P-P Plot**

Dari hasil Pengujian Normal P-P Plot tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang di teliti berdistribusi normal dikarenakan pola pada pengujian telah mengikuti garis.

**Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glesjer)**  
 Coefficients<sup>a</sup>

	Model	Sig.
1	(Constant)	.210
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.774
	Sistem Pelaporan	.315

a. Dependent Variable: RES\_2

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran adalah 0.774 > 0.05. Variabel Sistem Pelaporan adalah 0.315 > 0,05 artinya variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 9, nilai VIF pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Sistem Pelaporan (X2) sebesar 1,135 atau lebih kecil dari 10 dan Nilai Toleran sebesar 0,881 atau lebih besar dari 0,10 maka tidak ada gejala multikolonieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi masalah multikolonieritas.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas**  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF

1	(Constant)		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.881	1.135
	Sistem Pelaporan	.881	1.135

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah  
Source: Data diolah, 2020

**Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1.210	.574	
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.525	.122	.497
	Sistem Pelaporan	.216	.106	.234

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel 7, bentuk Unstandardized dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 1.210 + 0.525 X1 + 0.216 X2 + e$$

Diketahui bahwa konstanta 1.210 berarti bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan tetap konstan sebesar 1.210 jika tidak ada pengaruh dari variable Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), dan Sistem Pelaporan (X2). Selanjutnya, koefisien regresi X1 sebesar 0.525 memberikan arti bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) yang ditunjukkan dengan adanya Kejelasan Sasaran Anggaran, maka terjadi peningkatan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 52.5%. Berikutnya, koefisien regresi X2 sebesar 0.216 memberikan arti bahwa Sistem Pelaporan (X2) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Sistem Pelaporan maka akan terjadi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 21.6%.

**Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji-F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.864	2	1.432	16.394	.000 <sup>b</sup>
	Residual	4.629	53	.087		
	Total	7.493	55			

a. Dependent Variable: Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

**Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji-t)**

		Coefficients <sup>a</sup>	
Model		t	Sig.
1	(Constant)	2.109	.040
	Kejelasan Sasaran Anggaran	4.320	.000

Sistem Pelaporan

2.036

.047

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Source: Data diolah, 2020

Tabel 8 menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai  $F_{hitung}$  sebesar 16.394 >  $F_{tabel}$  sebesar 3.172 (nilai ini diperoleh dari MsExcel =FINV(5%,2,53) lalu enter) dengan nilai signifikansi (sig) sebesar (0.000) < (0,05) Maka hipotesis diterima yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengujian dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  >  $t_{tabel}$  sebesar 2.006 (nilai ini diperoleh dari MsExcel =TINV(5%;53) lalu enter) dan nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Disimpulkan bahwa pertama, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua, Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.618 <sup>a</sup>	.382	.359	.29554

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan nilai R Square (R<sup>2</sup>) ini dapat dikatakan bahwa sebesar 38.2% variasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dapat dijelaskan oleh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan sedangkan variasi Akuntabilitas Kinerja Instansi yang tidak dapat dijelaskan oleh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan tetapi bisa dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati oleh peneliti seperti Pengendalian Akuntansi, Ketetapan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, dan Audit Kinerja adalah sebesar 61.8% (100% - 38.2%).

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diterima. Apabila sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga semakin meningkat artinya dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang disusun dan dibuat dengan jelas dan jujur dapat memantau dan mempermudah serta mengendalikan kinerja aparat pemerintah dalam menyusun, mencapai target-target dan mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani et al., (2015) yang telah membuktikan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan diterima. Semakin jelas sasaran anggaran, maka akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. Artinya, kejelasan sasaran yang dibuat oleh bagian perencanaan anggaran dengan baik dan jelas akan mempermudah aparat pemerintah dalam menyusun dan mencapai target-target anggaran yang telah di tetapkan serta dapat mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, namun hal itu harus diiringi dengan komitmen seorang aparat pemerintah terhadap organisasinya barulah tercapainya tujuan tersebut. Yang paling dominan dalam membentuk kejelasan sasaran anggaran adalah Sasaran Prioritas. Dalam pembuatan anggaran, OPD menetapkan sasaran yang prioritas dimana anggaran tersebut harus digunakan untuk hal-hal yang menjadi prioritas utama. Berikutnya dalam melakukan koordinasi berdasarkan tingkat kesulitan dan kepentingan target, dengan tingkat kesulitan yang dianggap tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit maka akan membuat pegawai lebih teliti dalam menetapkan sasaran anggarannya. Sedangkan dalam hal meningkatkan pemahaman atas tujuan anggaran, maka pegawai di setiap OPD harus meningkatkan pemahaman terhadap tujuan anggaran sehingga kejelasan sasaran anggaran bisa menjadi lebih maksimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri, (2019) yang telah membuktikan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan diterima. Apabila sistem pelaporan meningkat, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat. Artinya sistem pelaporan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran, maka sistem pelaporan dapat memantau dan mengendalikan kinerja aparat dalam mengimplementasikan anggaran yang ditetapkan. Selain itu Sistem pelaporan juga merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk menyampaikan dan melaporkan informasi secara akuntabel dan transparan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang telah di ambil pemerintah daerah dalam suatu periode. Dalam sistem pelaporan menggambarkan penjelasan mengapa penyimpangan terjadi dengan melihat prosedur yang dilakukan benar atau tidak, mengambil tindakan yang akan di ambil jika penyimpangan terjadi dengan menyediakan data dan informasi keuangan secara terbuka, dan pengoreksian laporan keuangan dibutuhkan waktu yang lebih efektif guna meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha & Gayatri, (2016) yang membuktikan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Kota Makassar. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Kota Makassar. Artinya, Semakin jelas sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. Sama halnya dengan variabel Sistem Pelaporan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Kota Makassar. Apabila sistem pelaporan meningkat, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat.

Melalui penelitian ini, OPD Kota Makassar dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan lebih memperhatikan kerja Pegawai dari segi Spesifik, Terukur, Standar, Memiliki Batas Waktu, Sasaran Prioritas, dan Berorientasi pada hasil akhir, serta untuk mencapai Sistem Pelaporan yang baik seharusnya membandingkan kinerja keuangan, Menilai Kondisi Keuangan dan Hasil-Hasil Operasi, dan mengevaluasi Tingkat efisiensi dan efektifitas. selain itu, penelitian ini juga mengajukan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain diluar variabel pada penelitian ini agar memperoleh hasil yang bervariasi dan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## Referensi :

- Abdul, H., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- BPKP, P. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*.
- Cahyani, Mega, N. M., & Utama, I. M. K. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(3).
- Chintya, I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok (Studi pada Skpd Kota Solok). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hidayatullah, F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kantor Bupati Kuantan Singingi). *Universitas Komputer Indonesia*.
- Indrayani, L. F., Diatmika, P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Public. *E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8(2).
- Magdalena, Maria, & Kurniawati, H. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Artikel Ilmiah*.
- Mulyadi, A., Syamsidar, ., & Dedy, E. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2).
- Muslim, M., Ahmad, H., & Rahim, S. (2019). The effect of emotional, spiritual and intellectual intelligence on auditor professionalism at the inspectorate of South Sulawesi Province. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 73-84.
- Paramitha, I. A. M. D., & Gayatri. (2016). Pengaruh Ketetapan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas

Kinerja. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(3).

- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1).
- Rahim, S., Muslim, M., & Leo, M. (2018). Government Auditor Performance: The Main Role Of Locus Of Control. In *International Conference And Call For Paper (Vol. 1, No. 1)*.
- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020, October). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. In *Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020)* (pp. 1-6). Atlantis Press.
- Rosalin, F. (2011). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Studi pada BLU di Kota Semarang.
- Safitri, A. S. I. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah). *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 2(2).
- Setiawan, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Yusrianti, H., Ahmad Subeki., I. S. F., & Anggi, F. (2013). The Effect Of Regional Balance Sheet Disclosure And Accessibility Financial Statements On The Accountability Of Regional Financial Management In Palembang City. *Foura Annual Conference Penang Malaysia*, 1(1).